

**KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Kasus: Alun-alun Purworejo Tahun 2017-2018)**

Tri Wahyuningsih  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: [Triwahyu444@gmail.com](mailto:Triwahyu444@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kabupaten Purworejo adalah salah satu daerah yang tanggap akan pembangunan, dilihat dari kebijakan terkait dengan penataan kawasan alun-alun Purworejo. Agar terwujudnya kebijakan tersebut, pemerintah melakukan relokasi terhadap PKL kawasan alun-alun Purworejo. Pada saat kegiatan relokasi berlangsung terjadi sebuah penolakan dari pihak PKL. Mereka terbagi menjadi dua kubu yaitu PKL yang meu menerima relokasi dan yang menolak direlokasi. Pihak PKL yang menolak adanya relokasi ini melakukan demosntrasi dan memberikan gugatan kepada pemerintah Kabupaten Purworejo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemerintah dalam relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan alun-alun Purworejo Tahun 2017-2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, untuk mendeskripsikan fenomena komunikasi yang terjadi saat penelitian berlangsung. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan Teknik tersebut peneliti akan menemukan jawaban dari fenomena komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan PKL ketika melakukan relokasi. Dalam melakukan penelitian komunikasi menggunakan teori Harold Lasswell yang didalamnya memiliki indikator yaitu komunikator, Pesan, Media, Komunikan dan *Feedback*.

Proses komunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam relokasi PKL tahun 2017-2018 berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikator adalah Tim Khusus yang dibentuk dalam Keputusan Bupati Purworejo No 180 Tahun 2017. Pesan yang disampaikan dengan cara *face to face* melalui sosialisasi. Media yang digunakan adalah media cetak dengan surat edaran, media visual dengan spanduk dan media audio visual adalah mengunggah video melalui youtube. Komunikan dalam relokasi ini adalah PKL. *Feedback* dalam proses komunikasi adalah negatif dan positif. Dengan menggunakan Harold Lasswell proses komunikasi yang dilakukan pemerintah Purworejo telah berhasil.

Dalam proses komunikasi pemerintah masih adanya kendala yang membuat proses komunikasi terhambat. Kendala tersebut yaitu penggunaan bahasa, pemberian

penafsiran, perbedaan status, ketidaksediaan seseorang dalam menerima dan mengirim pesan, tekanan-tekanan, dan pembatasan. Dari kendala tersebut Pemerintah membuat langkah untuk mencapai komunikasi yang efektif.

**Kata Kunci : Komunikasi Pemerintah, Relokasi, Pedagang Kaki Lima.**

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah kabupaten Purworejo dalam relokasi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Purworejo tahun 2017-2018. Sehingga adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada pemerintah dan pihak PKL agar pihak keduanya saling bekerjasama dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten purworejo. Kabupaten Purworejo adalah salah satu daerah yang tanggap akan peningkatan kegiatan pembangunan. Dilihat dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan melakukan rencana penataan bagi pedagang kaki lima kawasan alun – alun Purworejo. Dengan harapan mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Purworejo. Selain itu keberadaan PKL kerap menimbulkan sebuah masalah seperti lalu lintas, kebersihan dan pengambilan hak pejalan kaki.

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul akibat keberadaan PKL sehingga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk di kelola dan dikaji lebih lanjut. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan munculnya peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu mengatur tempat dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan kebijakan tentang relokasi pedagang

kaki lima. Dalam mengimplemetasikan kebijakan tersebut perlunya komunikasi yang baik terhadap PKL sehingga peraturan tersebut dapat berhasil.

Ketika adanya penertiban yaitu dengan merelokasi PKL menimbulkan sebuah pro dan kontra. PKL yang kontra melakukan demonstrasi di gedung DPRD. Demonstrasi yang dilakukan oleh paguyuban pedagang kaki lima Pendowo Kabupaten Purworejo ini menuntut agar rencana relokasi para PKL di batalkan dengan cara orasi secara bergantian dan melakukan atraksi seni di halaman DPRD. Alasannya yaitu karena perubahan masterplan yang dibuat pemerintah di tahun 2014 dengan 2017 berbeda. Selain itu PKL juga menuntut karena merasa menyumbang PAD kepada pemerintah (Heksantoro, 2017).

Dari jumlah total 49 PKL yang berjualan di alun-alun Purworejo dan hanya 21 PKL yang mau direlokasi, selebihnya sebanyak 29 pedagang kaki lima menolak untuk di relokasi ke alun-alun Purworejo. Keadaan alun – alun Purworejo untuk sekarang ini tahun 2018 dikategorikan sudah bebas dengan kegiatan Pedagang Kaki Lima. Sebab setelah di lakukan observasi dengan melihat kenyataan bahwa aktifitas bagi pengguna jalan yang sudah terlihat lancar dan beberapa aktifitas lain seperti taman bermain untuk anak – anak juga sudah di bangun. Tempat santai dan penambahan seperti air mancur guna mempercantik alun – alun pun di bangun. Selain itu penambahan alat olahraga seperti alat Gym sebagai penunjang masyarakat ketika sedang melakukan aktifitas olahraga juga di sediakan.

Dengan keadaan tersebut, peneliti tertarik dengan dengan komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam relokasi Pedagang Kaki

Lima sehingga para PKL mau melakukan relokasi. Untuk bagian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan alun-alun Purworejo tahun 2017-2018?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu peneliti nantinya akan menemukan fenomena komunikasi pemerintah dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan alun – alun Purworejo. Subjek yang diambil oleh peneliti terbagi menjadi tiga pihak, dari pihak pemerintah adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dan Satuan polisi Pamong Praja. Dari pihak PKL yaitu ketua PKL, PKL dan pengacara PKL. Dari pihak masyarakat yaitu masyarakat lokal. Lokasi yang diambil yaitu alun-alun Purworejo karena penataan yang kurang baik sehingga pemerintah disini harus melakukan komunikasi dalam menata kawasan alun-alun Purworejo. Selain itu teknik pengumpulan data yang diambil yaitu ada tiga antara lain Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang diambil oleh peneliti yaitu data primer yang didapatkan secara langsung dilapangan dan data sekunder adalah data yang mendukung dan pelengkap dalam penelitian yang dapat diperpleh secara tidak langsung melalui media, dokumen atau informasi pendukung peneliti. Teknik analisis data yaitu proses yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif yang dapat dimulai dari prngumpulan data, reduksi data display data dan verifikasi dan penegasan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Proses Komunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo.**

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo ini sebelumnya telah membentuk TIM khusus untuk menangani Pedagang Kaki Lima. Proses komunikasi berkoordinasi dengan beberapa pihak pendukung. Tim khusus untuk menangani PKL ini sudah tercantum dalam keputusan Bupati Purworejo No 180 tentang pembentukan tim pembinaan, penataan dan pengawasan pedagang kaki lima kabupaten Purworejo. Tim tersebut adalah :

Tabel Tim khusus untuk menangani PKL

No	Jabatan dalam dinas/ instansi/ bagian/ lembaga	Kedudukan dalam tim
1.	Asisten sekretaris daerah bidang ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Purworejo	Penanggungjawab
2.	Kepala dinas koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Ketua
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Wakil ketua
4.	Kepala Bidang kecil menengah Dinas Koperasi, UKM kabupaten Purworejo	Sekretaris
5.	Kepala bidang Perdagangan dinas koperasi, UKM Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Kepala bidang penegakan Perda satuan Polisi dan pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Kepala Bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo	Anggota

9.	Unsur Badan Perencanaan pembangunan daerah Kab. Purworejo	Anggota
10.	Unsur dinas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Anggota
11.	Unsur bagian hukum sekretariat Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Unsur Bagian Perekonomian sekretariat Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertanaman kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Unsur Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo	Anggota
15.	Camat Purworejo	Anggota
16.	Camat Kutoarjo	Anggota

*Sumber: keputusan Bupati Purworejo no 180.18 / 457 Tahun 2017*

Dalam melakukan poses komunikasi, Tim khusus yang dibentuk atas dasar keputusan Bupati bekerja sama dalam menyampaikan pesan kepada komunikator yaitu PKL yang kemudian mendapatkan feedback.

a. Proses komunikasi Pemerintah kepada PKL

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Tim khusus penanganan PKL adalah memberikan pesan indirect atau tidak langsung. Pesan tidak langsung yang diberikan berupa surat edaran amanat dari Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Dan Usaha Serta Pembinaan Kaki Lima. Kemudian tim khusus tersebut melakukan pesan secara langsung yaitu bertatap muka langsung dengan melakukan sosialisasi.

Dalam melakukan proses komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada PKL kawasan alun-alun ini terjadi suatu Pro dan kontra yang kemudian pihak PKL melakukan demonstrasi. Pihak PKL kawasan alun-alun yang dibentuk pendowo PKL dan diketuai mas Tri melakukan penolakan dan

mangajukan gugatan kepada Bupati, kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang dan kepala dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan..

b. Proses komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan melakukan musrebnag kabupaten yang dilakukan setahun sekali. Proses ini mempermudah pemerintah untuk memberikan informasi terkait dengan penataan kawasan alun-alun Purworejo. Dengan adanya musrenbang diharapkan pemerintah mendapatkan dukungan sehingga dapat bergotong-royong mensukseskan kebijakan ini.

## 1. KOMUNIKATOR

Komunikator menurut Yusuf Zainal bisa disebut pengirim pesan, jadi komunikator dalam relokasi PKL disini adalah tim khusus yang sudah dibentuk menurut Peraturan Bupati Purworejo No 180 tentang pembentukan tim pembinaan, penataan dan pengawasan pedagang kaki lima kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan kebijakan penataan kawasan alun-alun Purworejo. Proses komunikasi yang dilakukan yaitu :



Tabel Proses komunikasi yang dilakukan

No	Komunikator	Tugas
1.	Kepala dinas koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.	Mensosialisasikan kepada PKL terkait dengan relokasi PKL ke Romansa.
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Mensosialisasikan dan menertibkan PKL.
3.	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo	Mensosialisasikan terkait dengan penertiban jalan.
4.	Unsur Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Mensosialisasikan penataan ruang yang baru dan desain romansa
5.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertanaman kabupaten Purworejo	Mensosialisasikan terkait dengan kebersihan.
6.	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo	Mensosialisasikan terkait dengan perijinan buka usaha

*Sumber: keputusan Bupati Purworejo no 180.18 / 457 /Tahun 2017*

Dinas/ instansi/ bagian/ lembaga yang ikut campur dalam relokasi ini memiliki tugas masing-masing. Dinas KUKMP selaku ketua dalam membina PKL dengan melakukan komunikasi secara langsung melalui sosialisasi kepada pihak PKL terkait dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Satpol PP melakukan komunikasi langsung terkait penataan dan evakuasi PKL. Dinas Perhubungan melakukan komunikasi terkait dengan penertiban jalan. DPUPR melakukan komunikasi langsung terkait dengan desain kepada PKL dan masyarakat. DLH melakukan komunikasi langsung dengan sosialisasi memberikan informasi terkait dengan kebersihan.

Langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten Purworejo dalam relokasi PKL alun-alun Purworejo dimulai pada tanggal 3 Mei yaitu melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL Melaksanakan sosialisasi revitalisasi Alun-alun Purworejo, pembangunan shelter PKL Alun-alun Purworejo di kompleks Kodim 0708 dan relokasi sementara PKL Alun-alun Purworejo bersama pengurus dan anggota PKL Pandawa. Dan di akhiri di tanggal 20 Januari dengan kegiatan melaksanakan pemantauan dan pendaftaran penempatan shelter. PKL yang melakukan relokasi adalah PKL yang menerima kebijakan dari pemerintah. sebanyak 29 PKL yang sudah mendaftar di bagian admin pendaftaran. Dan sebanyak 20 lainnya masih tetap melakukan penolakan kepada pemerintah.

## 2. PESAN

Pesan adalah berupa isi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan pertama yang dilakukan yaitu secara tertulis, ada 4 poin Pertama adalah notifikasi atas gugatan yang dikirimkan oleh PKL. Kedua adalah menjelaskan terkait relokasi alun-alun Purworejo atas pembangunan Taman kuliner Purworejo. ketiga adalah menjelaskan amanat atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Dan Usaha Serta Pembinaan Kaki Lima. Keempat adalah relokasi yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan individu.

Selanjutnya melalui pesan lisan atau bertatap muka secara langsung kepada PKL. Proses komunikasi lisan ini dilakukan dengan cara pendekatan personality yaitu

dengan cara datang satu persatu PKL dan melakukan sosialisasi dengan memberikan pengertian, kesadaran karena kebijakan ini akan bermanfaat lebih besar bagi masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Dinas KUKMP ini tidak hanya sekali atau dua kali namun berkali kali dengan memberikan suatu pengertian kepada pihak PKL. Dari suatu pengertian ini akan muncul kesadaran bagi pihak PKL untuk mau melakukan relokasi ke Romansa Kuliner Purworejo.

### 3. MEDIA/SALURAN

Media/ saluran yang digunakan dalam komunikasi dapat mempermudah pemerintah ketika menyampaikan sebuah pesan. Dalam melakukan atau menjalankan suatu kebijakan, pemerintah Purworejo telah melibatkan pembangunan terkait penataan kota ini dengan masyarakat Purworejo.

Tabel Media proses komunikasi pemerintahan

No	Media	
1	Cetak	Surat edaran
2	visual	Spanduk
3	Audio visual	Media sosial

Sumber: wawancara narasumber.

Dengan menggunakan media cetak yaitu melalui surat edaran pemberitahuan kepada PKL terkait dengan perubahan pelaksanaan relokasi sementara PKL Kuliner eks zona alun-alun Purworejo. Dari informasi tersebut melalui surat edaran dari pemerintah diharapkan pihak PKL mau melaksanakan peraturan baru dari pemerintah Kabupaten Purworejo.

Kedua yaitu melalui media visual dengan memasang spanduk 4 di bagian sisi sebelah barat dan timur yang ditunjukkan atas peraturan Bupati No 44 tahun 2017 tentang perubahan zonasi. Pengumuman untuk tanggal 14 Agustus 2017 adanya relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo. Cara yang digunakan ini mampu menyampaikan maksud pesan dari pemerintah yaitu pemberitahuan akan adanya relokasi PKL di kawasan alun-alun Purworejo. Sehingga masyarakat lokal maupun luar mengetahui akan adanya relokasi.

Ketiga, proses komunikasi dengan menggunakan media audio visual ini pemerintah telah menyiapkan desain animasi 3D yang di bagikan laman resmi melalui media sosial youtube. Dari audio visual ini pihak dari PKL memahami maksud dan tujuan pemerintah terhadap penataan kawasan alun-alun Purworejo. selain itu juga memperkenalkan secara luas terkait dengan perubahan yang akan dilakukan pemerintah dalam memperindah alun-alun dengan bebas PKL. Dengan cara ini pemerintah telah menyampaikan pesan menggunakan media perantara yaitu audio visual. Telah dibuktikan bahwa *feedback* yang diberikan masyarakat luas sangat baik dengan *like* sebanyak 200 dan penonton sebanyak 39 ribu lebih

#### 4. KOMUNIKAN

Komunikasikan dapat diartikan dengan penerima pesan. Dalam kasus komunikasi pemerintah dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo ini adalah pihak dari Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat. Setelah melakukan komunikasi terhadap

komunikasikan yaitu PKL maka muncul suatu respon dari PKL. Sebanyak 56 jumlah PKL seluruhnya yang berjualan di Alun-alun Purworejo namun ketika di data oleh Dinas KUKMP sebanyak 49 PKL. Untuk 7 PKL yang tidak terdaftar dikarenakan pada saat pendataan tidak berjualan dilokasi dan memang sudah tidak aktif berjualan di alun-alun Purworejo.

Dari jumlah seluruhnya 49, hanya hanya 29 yang mau direlokasi dan 20 PKL melakukan penolakan karena berbagai alasan, yaitu:

1. Terkait dengan *masterplan* yang sudah di sosialisasikan ditahun 2014 terkait dengan relokasi PKL ini berbeda dengan *masterplan* di tahun 2017. Perubahan tersebut disebabkan karena pergantian Pemimpin yaitu Bupati.
2. Seharusnya pemerintah sudah menyediakan tempat relokasi. Namun ketika PKL direlokasi, tempat yang akan disediakan masih dalam tahap pembangunan. PKL diberikan tempat sementara di jalan Meyjen Sutoyo, yang merupakan jalur utama.
3. Kecewanya PKL karena tempat relokasi adalah milik Kodim.

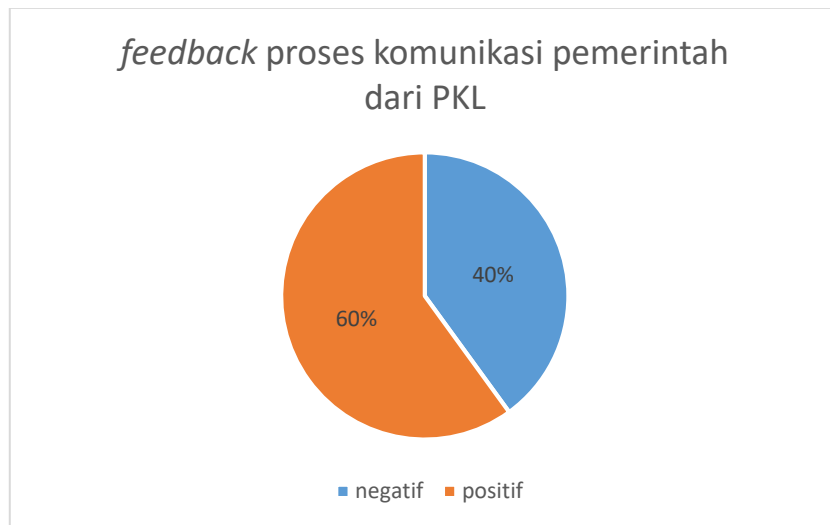
Tempat reklokasi yang akan ditempatkan PKL alun-alun Purworejo ini adalah tanah hibah dari kodim, jadi relokasi ini bukan tanah milik pemerintah daerah melainkan instansi lain. PKL tersebut menyewa kemudian dana tersebut masuk ke dalam kodim. Hal tersebut yang kemudian kontra kerena pemerintah daerah melepas tanggung jawab

## 5. FEEDBACK

### a. *Feedback* PKL

Proses komunikasi pemerintah dalam relokasi kawasan alun-alun Purworejo yang dilakukan komunikator kepada komunikan yang kemudian akan mendapatkan *feedback*. *Feedback* tersebut ada yang negatif dan ada yang positif. Dari pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada pihak PKL.

Bagan *Feedback* Proses komunikasi pemerintah



Sumber : Wawancara Narasumber

*feedback* yang didapatkan dilapangan setelah melakukan wawancara dan observasi adalah lebih dominan positif dengan angka 60%. Artinya memang pihak PKL mau menjalankan kebijakan pemerintah terkait dengan relokasi. Dengan total 49 PKL yang berjualan di alun-alun ini sebanyak 29 PKL mau di relokasikan ke romansa kuliner dan 20 diantaranya tidak mau atau menolak kebijakan terkait dengan relokasi.

Sehingga jika di presentasikan sebanyak 60% *feedback* positif dan 40% *feedback* negatif.

*Feedback* negatif yang dilakukan oleh pihak PKL yaitu dengan menggugat Bupati Purworejo, kepala Dinas KUKMP Purworejo, Kepala Dinas DPUPR Purworejo. Sebab mereka merasa bahwa keberadaan PKL tidak menyebabkan tergangungnya masyarakat dan tetap membayar retribusi untuk pemasukan daerah. Mereka mendukung dengan adanya rehabilitas alun-alun Purworejo namun mereka menuntut untuk tidak direlokasi ketempat lain. Meskipun pada akhirnya PKL direlokasi ke PKL namun hingga sekarang proses perkara yang ada dipengadilan belum selesai.

Dari jumlah tersebut awalnya memang banyak yang melakukan penolakan dan ikut demonstrasi, namun jika dilihat dari keterangan masuk pihak PKL memang hanya 16 PKL saja yang awalnya mau direlokasi. Dengan melakukan pemahaman dari pemerintah kepada PKL sehingga PKL mau melakukan relokasi dengan menambahkan sebanyak 13 PKL.

Pemerintah memang sudah menyiapkan sedemikian rupa fasilitas yang ada di Romansa Kuliner Purworejo. Selain pihak PKL yang senang dengan fasilitas tersebut, target dari pemerintah adalah meningkatkan wisatawan lokal maupun luar daerah. Untuk fasilitas yang ada di alun-alun Purworejo adalah:

1. Parkiran yang luas
2. Panggung hiburan

3. *Wifi*
4. *Shelter* yang berukuran 3x3 dan 2x3
5. Mushola
6. Toilet
7. *Whestavel*

b. *Feedback* masyarakat

Feedback yang didapatkan dari proses komunikasi pemerintah yang dilakukan kepada masyarakat ini lebih dominan dan hampir seluruhnya memang positif. Terlihat bahwa memang adanya masyarakat yang menyukai adanya relokasi PKL dan dibangunnya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Selain penataan wilayah, pemerintah juga melakukan pembangunan di alun-alun dengan membangun fasilitas umum untuk masyarakat.

Kinerja pemerintah terkait relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo dikatakan berhasil. Dengan bebasnya kegiatan PKL di sekitar alun-alun Purworejo ini membuat masyarakat nyaman. Sudah ada beberapa bangunan yang dibangun oleh pemerintah. Seperti alat Gym sebagai penunjang olahraga, beberapa tempat duduk santai yang telah disediakan pemerintah dan tempat bermain anak-anak. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mempercantik alun-alun Purworejo sehingga jumlah wisatawan meningkat.

6. Masalah/ Kendala dalam komunikasi pemerintah

a. Penggunaan bahasa



Dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua kalangan, pemerintah melakukan pemahaman tentang latar belakang mereka. Dari pemahaman tersebut, pemerintah menggunakan bahasa sehari-sehari yang dilakukan dengan tidak menambahkan unsur komunikasi yang sulit ditangkap oleh PKL. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

b. Pemberian penafsiran

Kesalahan arti atau ketangkapan penafsiran nampaknya muncul di proses komunikasi ini. Kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mengembalikan fungsi alun-alun sebagai fasilitas umum di tolak oleh sebagian PKL. Dua sisi pandang yang berbeda oleh PKL, yaitu pihak yang menerima dan menolak. Untuk pihak yang menerima akan adanya relokasi adalah dengan adanya relokasi ini mempermudah PKL yaitu tidak merubah tempat dagangan. Artinya jika menempati romansa dengan tempat yang tetap tersebut tidak merepotkan ketika membuka dan menutup penjualan mereka, selain itu juga tidak terkena hujan.

Dari sisi yang menolak dengan kebijakan Bupati ini adanya politik kotor, dapat dilihat dari pengelolaan manajemen pemerintahan dari awal masterplan tahun 2014 dan 2017 yang berbeda dan relokasi ini menggunakan tanah kodim bukan milik pemerintah. Dua pandangan tersebut bukti dari perbedaan penafsiran yang dilakukan ketika komunikator menyampaikan isi pesan kepada komunikan.

c. Perbedaan status

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Purworejo dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo terhambat dari latar belakang pendidikan. Dari jumlah 49 PKL eks alun-alun Purworejo ini dominan adalah tamatan SD bahkan ada yang tidak lulus. Hal tersebut yang kemudian menjadi kendala dalam proses komunikasi. Daya tangkap yang di dapatkan oleh PKL kurang.

d. Ketidaksediaan seseorang dalam memberikan dan menerima pesan

Sikap individual atau tidak mau menerima informasi adalah salah satu kendala dalam proses komunikasi. Pemerintah kabupaten Purworejo telah melakukan komunikasi baik kepada pihak PKL dan masyarakat ini sudah sangat terbuka. Dengan dilakukan pertemuan dengan pembahasan dari mulai perencanaan hingga evakuasi. Pertemuan tersebut dilakukan hingga sekarang dengan memberikan peluang bagi PKL maupun masyarakat untuk memberikan suatu keluhan apa saja yang akan disampaikan. Namun kendala yang dilapangan, proses komunikasi yang terjadi adalah ketidaktersediaan pihak PKL dalam menerima informasi.

e. Tekanan-tekanan

Adanya sebuah tekanan baik dari segi ekonomi, dimana ekonomi adalah hal yang sangat sensitif masyarakat. Maka dari itu dari tekanan yang dilakukan pemerintah terkait dengan relokasi berdampak dalam perekonomian untuk pihak

PKL. Mereka beranggapan bahwa adanya relokasi ini akan mengaibatkan penurunan penghasilan bagi PKL. Hal tersebut kemudian muncul sebuah kontra dan proses komunikasi yang dilakukan pemerintah terhambat.

f. Pembatasan

Batasan dari pihak PKL yang memberikan aspirasi terhadap kebijakan baru yang telah dibuat pemerintah ini yang tidak mendapatkan respon. Hal tersebut kemudian muncul sebuah penolakan. Seperti saat PKL datang ke kantor DPRD dan tidak adanya respon dari pemerintah. PKL merasa bahwa kebijakan ini tidak adil dan adanya manajemen pemerintah yang buruk. Dilihat dari lepasnya tanggungjawab dari pemerintah untuk membina PKL seperti lahan yang digunakan relokasi adalah milik Kodim 0708. Selain itu juga perubahan tidak adanya pemberitahuan kepada PKL ketika adanya perubahan terkait dengan *masterplan*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Proses komunikasi pemerintah dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo ini dikatakan berhasil. Dengan menganalisis menggunakan teori Lasswel proses komunikasi dengan berkoordinasi antara komunikator dengan komunikan dikatakan komunikatif. Meskipun dalam prosesnya mengalami sebuah kendala/masalah. Namun pemerintah menggunakan media/saluran yang mampu

menghilangkan kendala tersebut. Proses komunikasi yang berhasil ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Komunikator dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo adalah tim khusus yang diketuai oleh Dinas koperasi, UKM dan Perdagangan, dan diwakilkan oleh satpol PP dan anggota lembaga/dinas pendukung mampu berkoordinasi dengan baik. Sehingga proses tersebut mempermudah pelaksanaan kebijakan terkait relokasi PKL ke romansa kuliner.
2. Pesan yang disampaikan pemerintah yaitu dengan cara *face to face* bertemu langsung dengan PKL di lokasi dan melalui sosialisasi/ diskusi bersama di tempat Pendopo Purworejo. Pesan yang disampaikan oleh tim khusus berisi pemahaman terkait dengan penataan kota. Penyampaian pesan ini dilakukan tidak hanya sekali atau dua kali namun berkali-kali secara formal dan nonformal.
3. Media yang digunakan dalam proses komunikasi terkait relokasi PKL dengan menggunakan tiga media yaitu cetak , visual dan audiovisual. Media cetak melalui surat edaran, visual melalui spanduk dan audio visul melalui youtube. media tersebut mampu memberikan informasi terhadap PKL dan masyarakat.
4. Komunikan dalam relokasi ini adalah PKL dan masyarakat. Pihak dari PKL akhirnya mau direlokasi ke romansa kuliner Purworejo. Sebab proses yang dilakukan pemerintah ini mampu mengubah perilaku dan kondisi secara bertahap.

5. *Feedback*/ umpan balik dari proses komunikasi adalah positif dan negatif. 40% PKL menolak adanya relokasi ini dan melakukan demonstrasi. Namun dengan pendekatan yang dilakukan pemerintah selama satu tahun kurang ini mampu mengubah kondisi.

Dalam proses komunikasi yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo masih memiliki beberapa faktor penghambat seperti

1. Penggunaan bahasa yang mengakibatkan ketidakpahaman dari pihak PKL untuk menerima informasi yang diberikan oleh pemerintah.
2. Perbedaan pemberian penafsiran baik komunikator maupun komunikan.
3. Masih adanya tekanan dari pihak pemerintah ketika adanya relokasi kawasan alun-alun Purwoejo.
4. Perbedaan status antara pemerintah dengan pihak PKL
5. Ketidaksediaan seseorang baik dari PKL dan pemerintah yang tidak memberikan informasi dan menerima informasi

## **SARAN**

Dilihat dari permasalahan yang muncul ketika relokasi PKL, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah daerah
  - a. Dalam membuat kebijakan, Pemerintah diharapkan mampu melihat dari segi dampaknya, dalam hal ini pemerintah seharusnya konsisten terhadap kebijakan

yang telah dibuat terkait dengan relokasi PKL. Ketika adanya perubahan desain dari masterplan seharusnya memberikan informasi dahulu melalui musrebang.

- b. Pemerintah mampu melakukan promosi kepada masyarakat lokal maupun luar terkait dengan relokasi PKL alun- alun Purworejo ke Romansa Kuliner. Dengan hal tersebut masyarakat lokal maupun luar mengetahui relokasi PKL dan perekonomian PKL Romansa tetap terjaga dan meningkat.

## 2. Kepada Tim khusus pengelola PKL

- a. Perlunya melihat kelangsungan hidup PKL dengan tetap membina PKL pasca relokasi eks alun-alun malam Purworejo sehingga PKL tetap terpantau dari segi ekonominya
- b. Melakukan proses komunikasi sebaiknya dilakukan dengan memahami situasi/ kondisi dahulu. Dengan melihat situasi dan kondisi maka penolakan yang dilakukan oleh PKL mampu di minimalisir bahkan dihilangkan.
- c. Memberikan jangka waktu yang panjang ketika melakukan pemberitahuan atas relokasi sehingga pihak PKL dapat mengetahui informasi relokasi.

## 3. Kepada PKL

Mau memberikan informasi terkait dengan kondisi PKL, sehingga pemerintah juga memahami kondisi yang ada. Selain itu juga mau menerima informasi terlebih

dahulu terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan saling *sharing* lewat musrebang maka tidak adanya *miscommunication* atau salah penafsiran antara PKL, pemerintah dan masyarakat.

